

BAB I

PENDAHULUAN

Sikap agresif Korea Utara (*Democratic People's Republic of Korea*) dalam menyikapi reaksi dunia internasional mengenai program nuklir yang dimilikinya serta hubungannya yang tidak pernah damai dengan saudara kembarnya yakni Korea Selatan (*Republic of Korea*) serta insiden terakhir dimana kapal militer milik Korea Selatan tenggelam di wilayahnya sendiri merupakan salah satu alasan utama penulis memilih judul "*Penyelesaian Konflik Keamanan Semenanjung Korea Pasca Tenggelamnya Kapal Cheonan*" sebagai judul skripsi yang akan ditulis untuk menyelesaikan studi S1 di jurusan Ilmu Hubungan Internasional UMY.

Korea Utara dengan segala kekurangannya telah berhasil membuat negara-negara barat, dalam hal ini khususnya Amerika Serikat (*United States of America*) dan para sekutunya yang berada di Benua Eropa seperti Inggris (*United Kingdom*), Prancis (*France*), Jerman (*Germany*) maupun yang berada di wilayah Asia seperti Jepang (*Japan*) dan Korea Selatan (*Republic of Korea*) seperti kebakaran jenggot, dikarenakan berbagai tekanan yang telah diberikan dunia internasional dan dimotori oleh Amerika Serikat ternyata Korea Utara justru berhasil mencapai sebuah titik tertinggi dalam bidang persenjataan dan pertahanan negara yakni pengujian

Beberapa negara yang terlibat langsung dalam pengendalian kepemilikan nuklir Korea Utara ini bersama PBB (*United Nations*) maupun tidak, berusaha untuk memfasilitasi pembicaraan antara Korea Utara dengan Korea Selatan dan beberapa negara yang dianggap mampu untuk melakukan negosiasi dengan Korea Utara, namun sejauh ini hasil dari pertemuan tersebut masih mengalami pasang surut seperti gelombang laut yang tidak dapat berjalan dengan stabil, sehingga stabilitas keamanan wilayah Asia khususnya Asia Timur menjadi terancam dan membuat tetangga Korea Utara khususnya Korea Selatan dan Jepang menjadi sangat khawatir akan hal ini. Dunia internasional harus bekerja keras untuk menekan kemungkinan terjadinya ketidakstabilan keamanan di kawasan Asia Timur meski ancaman nuklir Korea Utara masih tetap ada.

A. Latar Belakang Masalah

Wilayah Korea yang dulunya (hingga tahun 1948) merupakan satu kesatuan harus terpecah menjadi dua negara yang berbeda, baik secara tingkat ideologi, ekonomi, tingkat kesejahteraan masyarakat dan kekuatan militernya. Hal ini dimulai ketika kekalahan Jepang di Perang Dunia II (*World War II*) sehingga Amerika Serikat yang menjadi pihak sekutu, yakni pihak yang keluar menjadi pemenang perang memegang kontrol atas wilayah Korea yang pada saat Perang Dunia II berlangsung masih berada di bawah kekuasaan Jepang.

Pada saat Amerika Serikat memegang pemerintahan atas Korea setelah kekalahan Jepang, Amerika Serikat membagi Korea menjadi dua bagian yang ditandai dengan dibangunnya jalan yang bernama *38th Parallel*, sebelah selatan dari *38th Parallel* tersebut dipegang oleh Amerika Serikat sedangkan sebelah utara dari *38th Parallel* dikuasai oleh Uni Soviet. Setelah pembagian tersebut ada usaha penyatuan negara dan bangsa Korea oleh rakyat Korea Selatan namun dihalangi oleh pemerintahan militer Amerika Serikat di Korea Selatan karena Amerika Serikat dan Uni Soviet merupakan sekutu (Amerika Serikat dan Uni Soviet merupakan sekutu dalam Perang Dunia II dikarenakan memiliki musuh bersama atau *common enemy* yakni Jerman yang dipimpin oleh Adolf Hitler dengan Nazi-nya) dan pembagian Semenanjung Korea tersebut telah ditetapkan dalam perundingan sekutu. Oleh sebab itu pemerintah militer Amerika Serikat terus membujuk pemerintah dan rakyat Korea Selatan untuk memihak Amerika Serikat dan menerima pembagian Semenanjung Korea.¹

Karena proses penyatuan kembali Korea yang menemui jalan buntu setelah dihalangi oleh Amerika Serikat maka pihak utara yang mendapatkan pengaruh dari Uni Soviet mendirikan negara sendiri yakni Korea Utara (*Democratic People's Republic of Korea* atau *DPRK*) pada tanggal 9 September 1948 yang dideklarasikan oleh Kim Il Sung. Pasca pendirian pemerintahan yang berideologi komunis oleh Korea bagian utara, ketegangan diantara kedua wilayah yakni Korea bagian utara dan

¹Yong Suno Yoon, *Military Merit and Policy Effectiveness in Korea*, Yonsei University, Seoul, 2001.

Korea bagian selatan semakin meningkat ditandai dengan terjadinya penyerangan lintas batas yang terjadi di sepanjang jalur *38th Parallel*. Ketegangan ini semakin meningkat ketika pada tanggal 25 Juni 1950, Korea Utara menginvasi Korea Selatan dan mengakibatkan kekalahan perdana bagi pihak Korea Selatan karena kekuatan militer Korea Utara yang lebih masif. Pasca terpukul mundurnya Korea Selatan, dunia internasional langsung bereaksi dengan masuknya PBB bersama beberapa negara sehingga menyebabkan perang yang tadinya hanya sebatas perang saudara menjadi perang internasional.

Masuknya PBB ke wilayah Korea pada masa Perang Korea yang dilegitimasi melalui Resolusi PBB nomor 83 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Juni 1950 yang isinya merekomendasikan kepada negara-negara anggota PBB untuk ikut serta membantu Korea Selatan menyebabkan terjadinya eskalasi konflik yang ditandai dengan ikut campurnya beberapa negara dalam perang ini. Seperti yang terjadi pada Perang Dunia, perang ini juga terbagi menjadi 2 blok yakni Korea Selatan yang didukung oleh Amerika Serikat, Inggris, Australia, Belgia, Kanada, Kolombia, Ethiopia, Prancis, Yunani, Luxemburg, Belanda, Selandia Baru, Filipina, Afrika Selatan, Thailand, Turki serta bantuan tim medis dari Norwegia, Swedia, Denmark, Italia dan India, berlawanan dengan Korea Utara yang didukung oleh Republik Rakyat China dan Uni Soviet dengan bantuan tim medis dari Ceko, Polandia, Hungaria, Bulgaria dan Rumania.²

² https://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Korea, Wacana dan Laporan, 133 September 2010, hal. 112-17.

Perang yang terjadi antara kedua Korea yang didukung oleh beberapa negara tersebut berlangsung hingga tahun 1953. Perang yang kemudian dikenal dengan nama *The Forgotten War* ini terhenti karena adanya gencatan senjata yang terjadi pada tanggal 27 Juli 1953 yang diprakarsai oleh PBB dengan adanya persetujuan dan kemauan untuk melakukan gencatan senjata oleh pihak yang bertikai yakni Korea Selatan didampingi oleh Amerika Serikat dan Korea Utara didampingi oleh Republik Rakyat China. Gencatan senjata tersebut juga diikuti oleh pembentukan Wilayah Demiliterisasi (*Korean Demilitarized Zone* atau *DMZ*) sejauh 4 kilometer yang membentang di perbatasan kedua Korea yang diawasi oleh militer dari Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat dan PBB.

Kemajuan yang dicapai oleh militer Korea Utara di bidang teknologi nuklir serta sikap yang ditunjukkan oleh dunia internasional terhadap Korea Utara melalui penerapan sanksi dari PBB maupun sanksi yang dilakukan oleh sebuah negara terhadap Korea Utara sehingga terkesan mengucilkan Korea Utara dan menyebabkan meningkatnya kembali ketegangan yang ada di wilayah Semenanjung Korea, dikarenakan adanya ketimpangan antara Korea Utara dengan saudaranya yakni Korea Selatan.

Ketimpangan yang ada nampak pada tingkat perekonomian negara, dimana Korea Selatan (*Republic of Korea*) yang memiliki tingkat perekonomian yang tinggi serta mendapat perlakuan yang sangat baik dari Amerika Serikat dan dunia internasional, sedangkan Korea Utara seperti dikucilkan dari pergaulan internasional karena ideologinya yang beraliran komunis dan negara yang sangat tertutup, sangat

protektif dan selektif terhadap segala macam pengaruh maupun informasi dari dunia luar yang bahkan pada saat berlangsungnya Pyongyang International Film Festival, sebuah festival film internasional yang diselenggarakan di Korea Utara tidak boleh disaksikan oleh semua orang dan hanya orang yang mempunyai koneksi dengan pejabat pemerintahan yang bisa ikut menyaksikan festival film tersebut.³

Meski begitu, Korea Utara sampai saat ini masih dapat bertahan dengan sistem komunis yang dianutnya, dengan pemimpin pemerintahan yang turun temurun dari Kim Il Sung yang merupakan pendiri negara Korea Utara atau *Democratic People's Republic of Korea (DPRK)* yang wafat pada tahun 1994 yang kemudian tampuk kekuasaan diturunkan kepada putranya yakni Kim Jong Il yang berkuasa hingga saat ini. Korea Utara juga memiliki kemajuan dalam bidang teknologi nuklir, hal ini sangat berguna bagi Korea Utara dikarenakan kepemilikan nuklir merupakan sebuah hal yang *prestige* dimata dunia internasional dan juga menjadi alat bagi Korea Utara untuk menjaga keamanan rezim, keamanan dalam negeri dan menekan dunia barat (Amerika Serikat dan sekutunya) untuk memberikan bantuan kepada Korea Utara.

Selain itu, nuklir juga menjadi alat bagi Korea Utara untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negerinya, oleh karena itu melihat peluang yang ada Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang melakukan perundingan supaya Korea Utara dapat mengatasi kekurangan energi dan mengusulkan pembuatan KEDO atau *Korean Peninsula Energy Development Organization*. Akhirnya usul pembentukan KEDO

³ Harian KOMPAS edisi 3 Oktober 2010, halaman 10. *Sulzari di Negeri yang Nihil Transparansi*

atau Organisasi Pembangunan Energi di Semenanjung Korea diwujudkan, dan memutuskan untuk membangun sebuah stasiun pembangkit listrik tenaga nuklir di kawasan Korea Utara. Namun ternyata meski hal tersebut telah direalisasikan, Korea Utara tetap tidak meninggalkan aktivitas nuklir dan militernya untuk menekan negara barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat agar tidak mencampuri urusan dalam negerinya dan tetap menyalurkan bantuan baik bantuan makanan maupun bahan bakar.⁴

Berbeda dengan Korea Utara, Korea Selatan yang lebih terbuka terhadap dunia internasional dan menikmati posisinya sebagai sekutu dari Amerika Serikat sehingga mempermudah segala sesuatu yang ada, menjadikan Korea Selatan memiliki perkembangan ekonomi yang pesat sehingga kemakmuran rakyat lebih terjamin dan kemajuan teknologi yang pesat. Ketidakmampuan Korea Selatan (*Republic of Korea*) secara militer ketika diserang oleh Korea Utara (*Republic People's Democratic of Korea*) pada tahun 1950 dahulu, kini telah tertutupi dengan adanya peralatan militer yang canggih yang disokong dengan keberadaan pasukan Amerika Serikat serta kemampuan ekonomi negara yang mumpuni.

Meski kedua negara yakni Korea Utara dan Korea Selatan berada pada posisi yang berbanding terbalik seperti yang telah dituliskan diatas yakni Korea Utara yang sangat tertutup dan memiliki kondisi perekonomian yang lemah dengan Korea Selatan yang terbuka dan memiliki kondisi perekonomian yang baik, namun usaha

⁴ Mohtar Mas'ood, Yung Saung Yoon, *Membahami Politik Korea*, Yogyakarta, Gadjah Mada University

untuk melakukan penyatuan kedua Korea (*Korean Unification*) agar ancaman keamanan terhadap kedua negara turun ke level minimal dan perdamaian dapat tercapai di Semenanjung Korea tetap berlangsung meski banyak menemui hambatan seperti kebijakan keras dari pemerintahan Korea Utara dan propaganda yang dilakukan oleh Korea Selatan di perbatasan.

Uji coba nuklir dan rudal yang dilakukan oleh Korea Utara juga memperkeruh suasana pengupayaan perdamaian karena menimbulkan kekhawatiran di pihak Korea Selatan maupun negara yang menjadi sekutu dari Korea Selatan yakni Jepang yang secara geografis letaknya berdekatan dengan Semenanjung Korea dan Amerika Serikat yang punya banyak kepentingan di kawasan serta adanya pasukan militer Amerika Serikat yang berada di Korea Selatan maupun Jepang.

Jepang dan Amerika Serikat pantas khawatir terhadap uji coba nuklir dan rudal Korea Utara karena pada uji coba yang dilakukan dalam bulan Mei 1993, Korea Utara melakukan uji coba penembakan rudal “Rodong – 1”, dengan perkiraan jarak tembak hingga 1.000 km, ke arah laut Jepang. Disusul peluncuran rudal balistik melewati wilayah udara Jepang yang dinyatakan sebagai peluncuran satelit pada Agustus 1998, kemudian Oktober 2004, Juli 2006 dengan roket berjenis “Nodong – 2 scud B” dan “Taepodong II” dan kemudian belum lama ini adalah uji coba nuklir pada 25 Mei 2009 yang dilakukan Korea Utara.

Pada saat Amerika Serikat dipimpin oleh Presiden George W. Bush, Korea Utara dikelompokkan ke dalam “Lingkaran Setan” yakni dianggap sebagai negara yang masuk daftar hitam karena dianggap mendukung kegiatan terorisme di dunia ini

Hal yang kemudian menambah derita Korea Utara karena negara yang menjadi sekutu Amerika Serikat juga mengetatkan hubungan mereka terhadap Korea Utara. Kemudian untuk meyakinkan Amerika Serikat untuk menghapus Korea Utara dari daftar hitam tersebut, Korea Utara menutup instalasi nuklirnya di Yeongbeon pada tahun 2007.

Namun hal tersebut tidak bertahan lama karena pada bulan Mei 2009, Korea Utara kembali melakukan uji coba rudal jarak jauhnya. Kemudian pada tahun 2010, tepatnya pada tanggal 26 Maret 2010, sebuah kapal milik Korea Selatan yang bernama "ROKS Cheonan" tenggelam di wilayahnya sendiri yang berbatasan dengan Korea Utara, hal yang tentunya merugikan bagi pihak Korea Selatan karena 46 marinirnya tewas dan kapal tersebut rusak parah. Tenggelamnya kapal tersebut menjadi misteri oleh karena itu penyelidikan dilakukan oleh beberapa negara, hal ini dikarenakan kasus ini dapat menjadi masalah yang sensitif bagi hubungan Korea Selatan dengan Korea Utara. Dikarenakan adanya peristiwa Cheonan tersebut maka proses negosiasi untuk reunifikasi Korea yang telah berjalan selama bertahun-tahun menjadi sangat terganggu.

B. Pokok Permasalahan

Melihat dari latar belakang yang telah tertulis diatas, dapat ditarik sebuah rumusan masalah : **"Bagaimana pengaruh insiden Cheonan terhadap prospek perundingan damai kawasan?"**

C. Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk :

1. Memberikan gambaran mengenai peta kekuatan Korea Utara dan Korea Selatan saat ini,
2. Memberikan gambaran mengenai proses perdamaian Korea Utara dan Korea Selatan yang sudah berjalan,
3. Menjelaskan bagaimana prospek perundingan damai di kawasan semenanjung Korea pasca insiden tenggelamnya kapal Cheonan,

D. Kerangka Pemikiran

Korea Utara dan Korea Selatan yang secara teknis masih dalam kondisi perang hingga sekarang ini memang memiliki hubungan yang unik dikarenakan kondisi hubungan kedua negara yang naik turun, kadang dalam kondisi yang baik dan tak jarang pula terdapat gangguan dalam hubungan tersebut. Namun meski begitu, untuk membicarakan “reunifikasi” untuk dapat kembali menjadi satu negara yang sama ketika sebelum masa Perang Dunia II maka haruslah dimulai dari sebuah hal yang kecil dahulu yang dinamakan “integrasi”. Integrasi tersebut juga harus dimulai dari sebuah hal yang kecil yaitu adanya saling percaya diantara kedua belah pihak, hal ini dikenal dengan sebuah konsep yang bernama “*confident – building measures*”, oleh karena itu kedua konsep yang saling mendukung ini tidak bisa dilepaskan dalam mengupas hubungan kedua Korea, maka penulis akan menggunakan kedua konsep

ini. Konsep Integrasi yang merupakan komposisi dari sebuah proses perundingan dan Konsep CBM yang merupakan faktor penting dalam terjadinya integrasi.

1. Konsep *Confident – Building Measures*

Konsep *Confident – Building Measures* (CBM) ini sering disebut sebagai *the ASEAN way* atau cara ASEAN dalam menyikapi konflik yang terjadi maupun pencegahan konflik di internal ASEAN, namun sebenarnya CBM ini bukanlah tercetus di wilayah ASEAN tetapi justru tercetus di Eropa tepatnya ada bulan Januari 1973 yang diprakarsai oleh Belgia dan Italia di Helsinki, Finlandia dalam agenda *the Conference on Security Co – operation in Europe* (CSCE). Setelah mengalami diskusi yang panjang dan beberapa penolakan akhirnya dapat disetujui dengan rumusan :

“in order to strengthen confidence and to increase stability and security, the Committee/Sub – Committee shall submit to the Conference appropriate proposals on confidence – building measures such as the prior notification of major military maneuvers on a basis to be specified by the Conference, and the exchange of observers by invitation at military maneuvers under mutually acceptable conditions.⁵”

Dalam bahasa Indonesia pengertiannya adalah “untuk menguatkan kepercayaan diri dan meningkatkan keamanan dan stabilitas maka delegasi harus mengajukan proposal yang relevan dalam hal *confidence-building measures* seperti pemberitahuan atas latihan militer dalam skala besar dan

pertukaran peninjau yang diundang dalam kegiatan pelatihan militer tersebut dibawah syarat yang telah disepakati.”

Dalam *draft* akhir dari negosiasi yang berlangsung di Helsinki, Finlandia ini disepakati bahwa tujuan umum dari CBM adalah untuk menghilangkan faktor yang dapat memicu terjadinya konflik dan menguatkan perdamaian dan keamanan. Namun secara spesifik juga disebutkan bahwa perlu adanya kontribusi dari negara di kawasan dalam mengurangi ancaman bahaya dari konflik bersenjata dan kesalahpahaman maupun salah perhitungan atas kegiatan militer yang terjadi di negara kawasan yang dapat meningkatkan ketakutan akan ancaman keamanan terlebih dalam situasi ketika negara tidak mempunyai informasi yang jelas dan lengkap tentang kegiatan militer yang terjadi. Dalam tahap awal perundingan ini hanya dua poin tentang CBM yang disebutkan secara jelas yakni pertukaran peninjau dalam kegiatan latihan militer skala besar dan pemberian informasi mengenai kegiatan latihan militer secara besar – besaran.⁶

2. Konsep Integrasi

Dalam literatur Ilmu Sosial dan Humaniora, terdapat satu tema umum bahwa permusuhan antar manusia akan berakhir kalau saja mereka memiliki

kesamaan⁷. Hal ini berarti bahwa konflik yang selama ini terjadi adalah dikarenakan perbedaan antar manusia dan konflik kepentingan, ketakutan, kecemburuan maupun kecurigaan yang muncul dikarenakan adanya perbedaan tersebut. Jika tiap individu diberi kesempatan untuk mengenal dan memahami satu sama lain maka rasa rasionalitas dan empati mereka akan muncul untuk mengurangi potensi konflik yang akan terjadi atau bahkan bisa mempermudah atau melunakkan konflik yang sedang atau telah terjadi diantara tiap individu.

Secara awam “integrasi” bisa berarti “menyatukan satuan-satuan yang terpisah menjadi satu kesatuan”. Menurut definisi Ernst Haas, integrasi adalah sebagai :

“proses dimana komunitas politik bergabung dengan komunitas politik lain yang terdorong untuk memudahkan pemerintahannya terhadap komunitas politik baru dengan memindahkan harapan, kesetiaan dan kegiatan politik mereka ke suatu pusat baru yang lembaga – lembaganya memiliki yurisdiksi atas negara yang sebelumnya dilakukan dengan cara – cara damai serta adanya jaminan untuk tidak saling berperang.”⁸

Menurut aliran neo fungsionalisme, integrasi merupakan suatu proses yang panjang dan sulit. Integrasi dilakukan melalui proses uji coba yang terus-menerus berdasarkan satu keberhasilan dari keberhasilan yang lain. Aliran ini menolak konsolidasi konstitusional secara cepat dan lebih mengutamakan

⁷ Michael Sullivan, *International Relations*, dalam Mas'ood, Mohtar, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1990, hal. 151 – 153

⁸ Saifudin, *Slainah: Tentang Sistem Politik Internasional*, LP3ES, Jakarta, 2001

integrasi sektor per sektor. Konsep integrasi ini mensyaratkan adanya empat sektor integrasi yakni ekonomi, sosial, politik dan keamanan.⁹ Aliran ini berpendapat bahwa dalam masyarakat paling serasipun tidak dapat mengintegrasikan semua fungsi umum secara bersamaan. Kolektivitas harus dilakukan per sektor ekonomi, politik, sosial maupun keamanan. Kemajuan bertahap dan paralel di dalam sektor tersebut akan berdampak pada menyatunya sektor tersebut dalam sebuah integrasi antarsektoral secara menyeluruh. Namun tanpa adanya penyatuan ini, integrasi akan terbatas dan terisolasi serta tidak memiliki pengaruh terhadap sektor yang lainnya. Dalam kasus konflik keamanan di semenanjung Korea, sektor politik dan ekonomi menjadi hal yang paling menonjol dan mempengaruhi dua sektor lainnya.

Penggabungan sistem ekonomi Korea Utara yang sentralistik dan Korea Selatan yang liberal menjadi hambatan paling mendasar bagi terciptanya integrasi yang kuat. Dalam mengintegrasikan perekonomian masing-masing negara menghapuskan hambatan perdagangan sehingga barang dapat mengalir dengan bebas, selain itu perlu dibentuk kawasan perdagangan bersama dengan memperhitungkan aspek tenaga kerja yang meliputi standar pemberian upah, kebijakan praktek ketenaga kerjaan, ketersediaan modal dan penciptaan mata uang bersama yang akan

⁹ Moe'ad, Mohtar. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. LE2ES, Jakarta, 1999, hal

mempermudah transaksi pembayaran menjadi beberapa faktor yang patut dipertimbangkan.

Dalam integrasi sosial, integrasi merujuk pada pertumbuhan komunikasi dan transaksi (seperti perdagangan, surat-menyurat, pariwisata, dan sebagainya).¹⁰ Dalam hal ini dengan dibukanya jalur komunikasi yang bisa ditandai dengan meningkatnya pertukaran informasi melalui media massa seperti program radio dan televisi bersama maupun surat kabar dan film, selain itu akses transportasi (baik darat, laut maupun udara), Korea Selatan dan Korea Utara akan memungkinkan akses komunikasi antar warga Korea terhubung kembali.

Dalam integrasi politik, umumnya menyiratkan tentang adanya suatu hubungan komunitas antar penduduk, adanya perasaan identitas yang sama dan kewajiban timbal-balik.¹¹ Dalam hal ini faktor yang paling mendasari adalah semangat nasionalisme yang berarti menyatakan keunggulan suatu afinitas kelompok yang didasarkan atas budaya, bahasa, sejarah, ras dan terkadang agama serta wilayah yang sama pula terhadap pengakuan lain atas loyalitas seseorang. Ikatan inilah yang dapat mendasari Korea Utara dan Korea Selatan untuk bisa menciptakan sebuah suasana yang damai diantara kedua negara dan kawasan meski belum bisa untuk mencapai ke sebuah tahap yang dinamakan reunifikasi.

¹⁰ *Jean Nya, Rana in Parts dalam Mnc'ed Mahtn. Baru Hubungan Internasional: Ditulis dan*

Dalam hubungan Korea Utara dan Korea Selatan yang mengalami pasang surut secara drastis maka untuk membicarakan masalah “reunifikasi” sepertinya masih jauh panggang dari api, oleh karena itu “integrasi” sepertinya menjadi target yang realistis untuk dapat dicapai, namun proses “integrasi” tersebut tidak akan dapat berjalan apabila tidak adanya kepercayaan diantara kedua belah pihak yang berkonflik.

Korea Utara dan Korea Selatan sebenarnya telah melakukan beberapa upaya untuk memperbaiki hubungan kedua negara, namun hal tersebut tidak pernah berlangsung permanen dikarenakan tingginya sensitivitas kedua negara satu sama lain. Kedua negara ini pernah mengalami titik tertinggi dalam proses sebuah integrasi yakni adanya pertukaran antar warga negara di kedua negara sehingga keluarga yang terpisah karena perpecahan negara dapat bertemu kembali, namun kemudian proses tersebut mengalami kemunduran dikarenakan adanya insiden tenggelamnya kapal jenis korvet milik Korea Selatan pada bulan Maret 2010 lalu. Hubungan kedua negara mengalami goncangan yang hebat dan proses integrasi yang telah diupayakan mengalami kemunduran.

Hal ini ditandai dengan adanya tuduhan dari Korea Selatan bahwa kapal Cheonan tersebut tenggelam karena ulah dari Korea Utara, sedangkan Korea Utara membantah keras hal tersebut. Hal ini jelas telah meruntuhkan kepercayaan antara kedua belah pihak sehingga kedua belah pihak merasa enggan untuk duduk bersama dan membahas mengenai kesesama maupun

proses integrasi kedua negara sehingga proses integrasi yang telah diupayakan sejak beberapa tahun yang lalu mengalami kemunduran yang signifikan.

E. Hipotesa

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka dasar pemikiran yang telah dijelaskan diatas, maka penulis dapat mengambil suatu hipotesa bahwa tenggelamnya kapal Cheonan milik Korea Selatan telah mempengaruhi upaya penyelesaian konflik keamanan di kawasan berupa:

1. Pertama, runtuhnya kepercayaan diantara kedua negara.
2. Kedua, proses integrasi yang sudah berjalan mengalami kemunduran.

F. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian disini dimaksudkan agar pembahasan penelitian tidak melebar. Dalam hal ini jangkauan penelitian dititikberatkan pada kekuatan ekonomi dan militer kedua Korea serta bagaimana insiden tenggelamnya Cheonan berpengaruh pada prospek tercapainya perdamaian di kawasan semenanjung Korea. Namun tidak menutup kemungkinan digunakannya data-data yang relevan dalam masa sebelumnya sejauh data tersebut mendukung penelitian ini.

G. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari berbagai literatur. Referensi

yang digunakan dari studi pustaka atas berbagai buku, surat kabar, jurnal-jurnal ilmiah, internet maupun dokumentasi lainnya yang dapat mendukung penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab. Penggambaran keseluruhan dari tiap-tiap bab adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan, berisi tentang alasan pemilihan judul, latar belakang masalah dari apa yang akan dibahas dalam penulisan ini lalu apa yang menjadi pokok permasalahan sehingga pembahasan menjadi lebih fokus. Selain itu Bab I juga akan berisi tentang tujuan penulisan, kerangka pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, metode pengumpulan data dan terakhir adalah sistematika penulisan.

Bab II. Sumber-sumber Konflik Kontemporer, akan menjelaskan mengenai sumber-sumber konflik kontemporer antara Korea Utara dan Korea Selatan yang akan terdiri dari tiga poin yakni nuklir, masalah yang ada di perbatasan darat dan sengketa yang terjadi di wilayah perairan kedua negara.

Bab III. Proses Integrasi Korea Utara – Korea Selatan, berisikan tentang apa yang terjadi dalam proses integrasi Korea Utara dan Korea

Selatan, hal ini akan dimulai sejak tahun 1960an yaitu pasca Perang Korea yang terjadi sebelumnya hingga sebelum terjadinya insiden Cheonan pada bulan Maret 2010 lalu. Sehingga akan nampak upaya kedua negara untuk meredam ketegangan diantara kedua negara.

Bab IV. Pengaruh Insiden Cheonan Terhadap Hubungan Korea Utara dan Korea Selatan, akan menjabarkan mengenai pengaruh dari insiden tenggelamnya kapal Cheonan tersebut pada hubungan kedua negara, yakni Korea Utara dan Korea Selatan. Insiden tersebut membawa pengaruh pada proses integrasi kedua negara yang telah dibahas pada Bab II.

Bab V. Kesimpulan, akan berisi mengenai kesimpulan dari apa yang telah dituliskan pada karya tulis ini secara menyeluruh. Dan halaman berikutnya setelah Bab V ini akan berisi lampiran yang memang dirasa dibutuhkan untuk kelengkapan karya tulis ini